

Membangun Resiliensi Perempuan dalam Menghadapi Banjir di Sumatera Utara: Perspektif Kebijakan Responsif Gender

Juwita Siregar^{1*}, Muhamad Fikri², Ika Arinia Indriyany³

¹⁻³ Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: 6670230101@untirta.ac.id^{1*}, 6670230023@untirta.ac.id², ika.arinia@untirta.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 6670230101@untirta.ac.id¹

Abstract. *Floods are one of the most frequent hydrometeorological disasters in Indonesia and cause various social, economic, and environmental impacts on communities. In disaster situations, women often face greater vulnerability than men due to limited access to resources, high domestic responsibilities, and minimal protection in disaster policies. Although the government has adopted a gender mainstreaming policy in development, its implementation in disaster management policies remains suboptimal. This study aims to analyze how flood management policies integrate gender perspectives and identify the impacts of floods on women. The study used a qualitative approach using literature study methods and media content analysis to understand the dynamics of policies and women's experiences in disaster situations. The results show that disaster management policies still tend to focus on technical and infrastructure aspects, while women's specific needs are often overlooked, particularly regarding security in refugee camps, access to reproductive health services, and increased domestic burdens during crises. This condition indicates that the integration of a gender perspective in disaster policies still faces various structural and institutional barriers. Therefore, efforts are needed to strengthen the implementation of gender-responsive policies so that disaster management does not only focus on physical mitigation, but is also able to provide fairer and more inclusive protection for all community groups.*

Keywords: *Disaster Policy; Floods; Gender Mainstreaming; Social Resilience; Women.*

Abstrak. Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan bagi masyarakat. Dalam situasi bencana, perempuan sering menghadapi kerentanan yang lebih besar dibandingkan laki-laki karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, tanggung jawab domestik yang tinggi, serta minimnya perlindungan dalam kebijakan kebencanaan. Meskipun pemerintah telah mengadopsi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, implementasinya dalam kebijakan penanggulangan bencana masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan penanggulangan banjir mengintegrasikan perspektif gender serta mengidentifikasi dampak banjir terhadap perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten media untuk memahami dinamika kebijakan serta pengalaman perempuan dalam situasi bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana masih cenderung berfokus pada aspek teknis dan infrastruktur, sementara kebutuhan spesifik perempuan sering kali kurang diperhatikan, terutama terkait keamanan di pengungsian, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan peningkatan beban domestik selama masa krisis. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan kebencanaan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan institusional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi kebijakan yang responsif gender agar penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada mitigasi fisik, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Kata kunci: Banjir; Kebijakan Bencana; Ketahanan Sosial; Pengarusutamaan Gender; Perempuan.

1. LATAR BELAKANG

Sumatera Utara secara konsisten menghadapi fenomena banjir sebagai bencana hidrometeorologi berulang yang semakin intensif dalam dekade terakhir, fenomena ini dipicu oleh kombinasi faktor alam dan antropogenik. Banjir besar yang terjadi pada akhir 2025, khususnya November-Desember, menjadi puncak kekhawatiran masyarakat dengan dampak dahsyat yang mengakibatkan lebih dari 283 jiwa meninggal di wilayah Sumatera Utara saja,

Naskah Masuk: 13 Januari 2026; Revisi: 12 Februari 2026; Diterima: 15 Maret 2026; Tersedia: 17 Maret 2026

ribuan rumah terendam, dan 20.000 orang mengungsi akibat luapan sungai utama seperti Sungai Deli, Batang Gadis, dan Pantai Bokek. Data BNPB per 12 Desember 2025 mencatat 53 kabupaten/kota terdampak, dengan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah, termasuk rusaknya 215 puskesmas, infrastruktur jalan, dan lahan pertanian seluas ribuan hektar yang mengancam ketahanan pangan lokal (Mazayahagie, et.al, 2026).

Secara historis di Sumatera Utara, frekuensi banjir meningkat 30% sejak 2015, sesuai rekapitulasi BNPB, dengan pemicu utama curah hujan di atas normal akibat perubahan iklim global yang memperkuat Fenomena La Niña, selain itu faktor lokal seperti sedimentasi sungai dan drainase buruk di kota-kota padat menjadi pemicu banjir. Banjir di Sumatera Utara pada tahun 2025 bukan hanya sekedar bencana alam murni, melainkan hasil konstruksi manusia itu sendiri yang mengakibatkan hilangnya 20% vegetasi DAS (Daerah aliran sungai) dalam lima tahun terakhir yang akhirnya mempercepat erosi dan mengakibatkan banjir kilat. Fenomena ini menimbulkan siklus kerentanan kronis, di mana pemulihan setelah banjir sering terganggu oleh kejadian berikutnya yang akhirnya menjadi memperlemah kapasitas adaptasi masyarakat dan pemerintah daerah di Sumatera Utara.

Fenomena banjir ini bukanlah hal yang terjadi secara sporadis, sebabnya pada DAS (Daerah aliran sungai) di Pantai Bokek pernah terjadi banjir pada tahun 2020 yang merendam perumahan seperti Tanjung Selamat Indah dan De Flamboyan hingga ketinggian 3 hingga 4 meter, yang akhirnya menghambat akses air bersih, sanitasi, dan mobilitas penduduk selama berminggu-minggu. hal ini juga sama seperti yang terjadi di sungai Bengawan Solo, di mana hilangnya tutupan hutan dan overload bendungan yang menjadikan cepatnya aliran permukaan, fenomena yang identik di Sumatera Utara yang diakibatkan oleh konversi lahan gambut dan perkebunan sawit ilegal. Kerusakan ekosistem hutan hulu DAS, ditambah urbanisasi tak terkendali di Medan juga, menciptakan "efek bathtub" di mana air hujan tak terserap dan sungai tak mampu menampung debit puncak hingga 5.000 m³/detik.

Di Sumatera Utara, banjir merupakan ancaman rutin yang tidak hanya mengganggu infrastruktur fisik, tetapi juga menegaskan kembali ketidaksetaraan gender dalam akses sumber daya, informasi, dan peluang pemulihan. Kerentanan perempuan dalam konteks bencana ini dipicu oleh peran sosial tradisional, keterbatasan mobilitas, serta ketidakpastian akses terhadap layanan dasar seperti keselamatan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan saat darurat. Perempuan sering menjadi pengambil keputusan di dalam rumah tangga terkait penyediaan pangan dan perlindungan anak, namun sering kali mengalami hambatan dalam akses ke bantuan cepat dan adopsi langkah kesiapsiagaan karena kendala budaya maupun struktural. Akibatnya, dampak banjir terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rumah

tangga perempuan berpotensi lebih berat dibandingkan kelompok lain, sehingga diperlukan analisis yang terarah terhadap faktor-faktor penentu resiliensi perempuan dalam menghadapi bencana air.

Penelitian ini menyoroti bahwa kerentanan gender bukan sekadar kondisi individu, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, institusi publik, serta norma budaya yang berjalan di wilayah tersebut. Klaster data dan temuan dari literatur global menunjukkan bahwa melibatkan perspektif gender dalam perencanaan dan respons kebencanaan meningkatkan efektivitas intervensi, namun implementasinya di tingkat lokal masih sering terhambat oleh kurangnya data disaggregated gender, partisipasi perempuan yang rendah, serta mekanisme evaluasi kebijakan yang belum responsif gender. (Herald et al., 2025)

Pada penanggulangan bencana, kebijakan ataupun bantuan yang diberikan kerap kali tidak mempertimbangkan perspektif gender. Dimana dalam implementasi kebijakan tersebut adanya gender yang dirugikan dan tidak diberikan perlakuan khusus terkait gender mereka. Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia pada umumnya masih belum responsif gender karena lebih menitikberatkan pada aspek fisik dan logistik tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan. Misalnya, dalam pengelolaan pengungsian pasca bencana, kebijakan hanya mengatur jumlah tenda dan distribusi logistik umum, tetapi tidak menyediakan ruang aman, sanitasi terpisah, atau layanan kesehatan reproduksi. Hal ini membuat perempuan menghadapi risiko pelecehan, kurang privasi, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. (Herald et al., 2025)

Begitu pula dalam distribusi bantuan sosial, kebijakan cenderung bersifat netral gender dengan menyediakan bahan pokok umum seperti beras dan mie instan, sementara kebutuhan khusus seperti pembalut, susu bayi, atau layanan kesehatan ibu sering terabaikan. Selain itu, kebijakan adaptasi iklim di beberapa daerah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur seperti tanggul dan drainase, tetapi tidak memasukkan perspektif gender sehingga perempuan yang kehilangan mata pencaharian atau akses air bersih tidak mendapatkan program pemulihan yang sesuai. Kurangnya penggunaan data terpilah gender dalam perencanaan juga membuat kebijakan pengurangan risiko bencana bersifat “gender-blind,” sehingga dampak berbeda yang dialami laki-laki dan perempuan tidak terakomodasi. Akibatnya, perempuan sering kali lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender, kehilangan mata pencaharian, dan minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan bencana. (Koordinasi Antar Stakeholders Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang -Nesya Yulia Murni dan Zikri Alhadi et al., n.d.)

Keterbatasan representasi perempuan dalam kebijakan, khususnya kebijakan bencana, terjadi karena perempuan sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan program. Struktur birokrasi dan budaya patriarki membuat posisi perempuan lebih banyak ditempatkan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai pengambil kebijakan. Akibatnya, perspektif dan pengalaman perempuan yang sebenarnya sangat penting dalam konteks bencana misalnya terkait kebutuhan pengungsian, kesehatan reproduksi, keamanan, dan pemulihan ekonomi tidak terakomodasi dengan baik.

Selain itu, data yang digunakan dalam perumusan kebijakan bencana umumnya tidak terpilah berdasarkan gender. Hal ini menyebabkan kebijakan bersifat “gender-blind,” seolah-olah dampak bencana sama bagi semua orang, padahal perempuan dan laki-laki memiliki kerentanan yang berbeda. Minimnya representasi perempuan juga terlihat dalam forum-forum kebijakan di tingkat daerah maupun nasional, di mana jumlah perempuan yang duduk sebagai pengambil keputusan masih sangat kecil. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung bias dan tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan, sehingga memperburuk ketidakadilan dan kerentanan mereka dalam situasi bencana. (Nawar & Setyoko, 2019) Dengan kata lain, keterbatasan representasi perempuan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kualitas partisipasi. Tanpa keterlibatan yang bermakna, kebijakan bencana akan terus gagal memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi semua kelompok masyarakat

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori *Feminist Institutionalism* yang dikembangkan oleh Mackay, Kenny & Chapell, 2010. Teori *Feminist Institutionalism* merupakan pendekatan dalam kajian kelembagaan yang berusaha memahami bagaimana institusi baik formal maupun informal dibentuk, dijalankan, dan dipengaruhi oleh norma serta praktik yang bersifat gendered. Teori ini menolak pandangan bahwa institusi bersifat netral, karena pada kenyataannya aturan, prosedur, dan budaya kerja yang ada sering kali mereproduksi ketidaksetaraan gender dan memperkuat dominasi laki-laki. Dalam kerangka ini, institusi tidak hanya dipahami sebagai struktur formal seperti regulasi atau kebijakan, tetapi juga mencakup aturan tidak tertulis, budaya organisasi, serta jaringan sosial yang membentuk relasi kekuasaan. Norma-norma patriarki yang melekat di dalam institusi membuat perempuan sering kali berada pada posisi subordinat, sehingga partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas.

Dalam konteks kebijakan bencana, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan mengapa perempuan sering kali kurang terwakili dalam proses perencanaan maupun implementasi

kebijakan. Misalnya, lembaga penanggulangan bencana cenderung menyusun kebijakan yang bersifat “gender-blind,” seolah-olah dampak bencana sama bagi semua orang, padahal perempuan memiliki kerentanan yang berbeda, seperti kebutuhan akan ruang aman, layanan kesehatan reproduksi, dan akses terhadap pemulihan ekonomi. Aturan informal seperti budaya patriarki juga membuat suara perempuan sulit masuk ke dalam kebijakan, meskipun mereka memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, *Feminist Institutionalism* membantu kita melihat bahwa ketidaksetaraan gender dalam kebijakan bukan sekadar masalah individu, melainkan berakar pada struktur dan praktik institusi yang sudah terbangun. Perspektif ini mendorong perlunya transformasi kelembagaan agar kebijakan lebih inklusif, responsif gender, dan mampu memperkuat resiliensi perempuan dalam menghadapi situasi krisis.

Dalam perspektif *Feminist Institutionalism*, institusi politik dipahami sebagai arena yang tidak netral gender karena aturan, norma, dan praktik yang berlaku di dalamnya sering kali mereproduksi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Institusi politik, baik dalam bentuk regulasi formal maupun aturan informal, dibangun di atas struktur sosial yang sarat dengan nilai patriarki. Hal ini membuat proses politik lebih banyak mengakomodasi kepentingan laki-laki, sementara pengalaman dan kebutuhan perempuan cenderung terpinggirkan. Misalnya, aturan formal seperti mekanisme pencalonan atau prosedur pengambilan keputusan sering tidak mempertimbangkan hambatan yang dihadapi perempuan, sehingga partisipasi mereka tetap rendah. Di sisi lain, aturan informal seperti budaya kerja maskulin, jaringan politik yang didominasi laki-laki, dan stereotip gender memperkuat eksklusi perempuan dari ruang politik. (Admin, +hal+63-68+Satria+Adi+Nugraha, ++Doris+Febriyanti, ++Novia+Kencana, n.d.)

Dalam konteks kebijakan bencana, ketidaknetralan gender dalam institusi politik terlihat dari minimnya representasi perempuan dalam lembaga penanggulangan bencana maupun forum kebijakan daerah. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung “gender-blind,” yaitu menganggap dampak bencana sama bagi semua orang, padahal perempuan memiliki kerentanan khusus seperti kebutuhan akan ruang aman, layanan kesehatan reproduksi, dan akses pemulihan ekonomi. Dengan demikian, *Feminist Institutionalism* menegaskan bahwa institusi politik bukanlah wadah netral, melainkan struktur yang secara sistematis membentuk dan mempertahankan relasi kuasa gender. Untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, diperlukan transformasi kelembagaan yang membuka ruang partisipasi perempuan secara bermakna dan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahap perumusan kebijakan.

Dalam perspektif *Feminist Institutionalism*, kebijakan bencana dapat dipahami sebagai produk dari institusi politik dan birokrasi yang tidak netral gender. Institusi penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah, dibentuk oleh aturan formal seperti regulasi dan prosedur, serta aturan informal seperti budaya kerja dan norma sosial. Karena institusi ini sering kali beroperasi dalam kerangka patriarki, kebijakan yang dihasilkan cenderung “gender-blind,” yaitu menganggap dampak bencana sama bagi semua orang tanpa memperhatikan perbedaan kerentanan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam pengelolaan pengungsian, kebijakan lebih menekankan pada logistik umum seperti tenda dan makanan pokok, tetapi mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan seperti ruang aman, sanitasi terpisah, dan layanan kesehatan reproduksi. (Siregar & Ginting, 2023)

Selain itu, keterbatasan representasi perempuan dalam lembaga penanggulangan bencana membuat suara mereka jarang masuk ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Aturan informal seperti jaringan politik yang didominasi laki-laki dan stereotip gender memperkuat eksklusi perempuan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan pengalaman mereka yang sebenarnya sangat penting dalam menghadapi bencana. Dengan menggunakan teori *Feminist Institutionalism*, kita dapat melihat bahwa bias gender dalam kebijakan bencana bukan hanya masalah teknis, tetapi berakar pada struktur dan praktik institusi yang sudah mapan. Oleh karena itu, transformasi kelembagaan diperlukan agar kebijakan bencana lebih responsif gender, dengan cara membuka ruang partisipasi perempuan secara bermakna, menggunakan data terpilah gender, dan memastikan kebutuhan kelompok rentan terakomodasi dalam setiap tahap penanggulangan bencana. (Riyaning et al., n.d.)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan kebencanaan serta pengalaman perempuan dalam menghadapi bencana banjir di Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif, khususnya terkait relasi gender, praktik kebijakan publik, serta dinamika institusional yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang dikombinasikan dengan media content analysis. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu gender, kebencanaan, dan kebijakan publik. Pendekatan

ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai bagaimana perspektif gender diintegrasikan dalam kebijakan penanggulangan bencana.

Sementara itu, media content analysis digunakan untuk menganalisis berbagai informasi yang muncul dalam pemberitaan media dan platform digital terkait dampak banjir terhadap perempuan di Sumatera Utara. Sumber data yang dianalisis meliputi berita media daring, laporan kebencanaan, serta konten dari media sosial seperti Instagram, TikTok, dan situs web yang membahas pengalaman perempuan dalam situasi bencana. Analisis terhadap media ini penting untuk melihat bagaimana pengalaman perempuan direpresentasikan dalam ruang publik serta bagaimana narasi kebijakan dan praktik penanganan bencana dipahami oleh masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti dokumen kebijakan penanggulangan bencana, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), laporan organisasi internasional, serta publikasi ilmiah terkait pengarusutamaan gender dan kebijakan kebencanaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kerentanan perempuan, representasi politik perempuan, serta implementasi kebijakan responsif gender dalam penanggulangan bencana banjir.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami keterkaitan antara pengalaman perempuan di lapangan dengan dinamika institusional dalam proses kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Feminist Institutionalism.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Integrasi Gender Mainstreaming

Bencana banjir merupakan salah satu jenis bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian bencana di Indonesia setiap tahunnya didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Dalam laporan BNPB (2023) disebutkan bahwa banjir menempati posisi tertinggi dengan lebih dari 1.500 kejadian banjir sepanjang tahun 2022, yang menyebabkan jutaan penduduk terdampak serta kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kebijakan publik yang memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif dan inklusif.

Secara normatif, kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia dalam situasi bencana. Implementasi kebijakan tersebut kemudian dijalankan melalui berbagai lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.

Selain kerangka hukum kebencanaan, pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi kebijakan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pembangunan memperhatikan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan perempuan serta laki-laki secara setara. Dalam konteks kebencanaan, integrasi gender mainstreaming seharusnya tercermin dalam berbagai tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan mitigasi bencana, pengelolaan pengungsian, distribusi bantuan, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Namun dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan kebencanaan masih belum optimal. Studi yang dilakukan oleh UN Women (2020) menunjukkan bahwa kebijakan kebencanaan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih cenderung bersifat gender-blind, yaitu tidak secara eksplisit mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kerentanan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dalam berbagai program mitigasi bencana yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul, drainase, dan sistem peringatan dini, sementara kebutuhan sosial kelompok rentan sering kali kurang mendapat perhatian.

Kelemahan ini juga terlihat dalam pengelolaan fasilitas pengungsian saat bencana terjadi. Dalam beberapa kasus bencana di Indonesia, fasilitas pengungsian tidak menyediakan ruang yang aman dan terpisah bagi perempuan. Laporan *United Nations Population Fund* (UNFPA) tahun 2021 menunjukkan bahwa dalam situasi darurat bencana, sekitar 15–20 persen perempuan yang terdampak berada dalam kondisi hamil atau membutuhkan layanan kesehatan reproduksi, namun fasilitas kesehatan darurat sering kali tidak memiliki layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kebencanaan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dalam situasi krisis.

Dalam perspektif Feminist Institutionalism, kondisi ini dapat dipahami sebagai hasil dari struktur institusi kebijakan yang masih dipengaruhi oleh norma dan praktik maskulin. Institusi kebijakan publik sering kali lebih menekankan pendekatan teknokratis dan infrastruktur, sementara dimensi sosial yang berkaitan dengan pengalaman perempuan kurang mendapatkan perhatian dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, meskipun kebijakan pengarusutamaan gender telah diadopsi secara formal, implementasinya dalam kebijakan kebencanaan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan institusional.

Dampak Banjir terhadap Perempuan

Banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik terhadap lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dalam banyak situasi bencana, perempuan sering mengalami tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya serta perlindungan sosial. Kerentanan ini dapat terlihat dari berbagai aspek seperti keamanan di pengungsian, kesehatan reproduksi, serta peningkatan beban domestik yang harus ditanggung perempuan selama dan setelah bencana.

Salah satu persoalan utama yang sering muncul dalam situasi bencana adalah masalah keamanan perempuan di lokasi pengungsian. Tempat pengungsian yang padat dan terbatas sering kali tidak menyediakan ruang privasi yang memadai bagi perempuan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Laporan *UN Women* (2020) menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami kekerasan dalam situasi bencana karena lemahnya sistem perlindungan serta minimnya fasilitas pengungsian yang sensitif gender.

Selain persoalan keamanan, isu kesehatan reproduksi perempuan juga menjadi perhatian penting dalam situasi bencana. Kerusakan fasilitas kesehatan serta terbatasnya tenaga medis sering menyebabkan perempuan kesulitan mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Data dari UNFPA (2021) menunjukkan bahwa dalam situasi bencana, sekitar 15–20 persen perempuan di wilayah terdampak berada dalam kondisi hamil dan membutuhkan layanan kesehatan khusus seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan aman, serta akses terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi. Namun dalam banyak kasus, fasilitas kesehatan darurat tidak mampu menyediakan layanan tersebut secara memadai.

Dampak lain yang sering dialami perempuan dalam situasi banjir adalah meningkatnya beban domestik dalam keluarga. Dalam banyak masyarakat, perempuan memiliki tanggung jawab utama dalam mengurus rumah tangga, termasuk menyiapkan makanan, merawat anak,

serta menjaga kesehatan anggota keluarga. Ketika bencana terjadi, tanggung jawab ini seringkali menjadi lebih berat karena perempuan harus mengelola keterbatasan sumber daya di tengah kondisi krisis. Penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 2022) menunjukkan bahwa perempuan cenderung menghabiskan waktu lebih banyak dalam pekerjaan domestik selama masa bencana dibandingkan laki-laki, terutama dalam mengurus kebutuhan keluarga di pengungsian maupun selama proses pemulihan pascabencana. Dengan demikian, banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik terhadap lingkungan, tetapi juga memperlihatkan adanya ketimpangan gender dalam pengalaman bencana.

Peran Perempuan dan Resiliensi dalam Penanggulangan Bencana

Meskipun perempuan sering dipandang sebagai kelompok rentan dalam situasi bencana, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam membangun resiliensi komunitas. Resiliensi dalam konteks kebencanaan merujuk pada kemampuan individu maupun komunitas untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana. Dalam banyak kasus, perempuan memainkan peran kunci dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas selama masa krisis.

Perempuan sering menjadi aktor utama dalam mengorganisasi bantuan komunitas serta membangun solidaritas sosial di tingkat lokal. Dalam berbagai kasus bencana di Indonesia, perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas pemulihan seperti mengelola dapur umum, mendistribusikan bantuan logistik, serta memberikan dukungan sosial kepada keluarga yang terdampak bencana. Penelitian yang dilakukan oleh Oxfam (2020) menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi penggerak utama dalam jaringan solidaritas komunitas setelah bencana terjadi, terutama dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi.

Selain itu, perempuan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Dalam berbagai program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, perempuan sering dilibatkan dalam kegiatan pelatihan kesiapsiagaan, pendidikan kebencanaan, serta pengelolaan sumber daya lokal. Studi yang dilakukan oleh UNDRR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*, 2019) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam program pengurangan risiko bencana dapat meningkatkan efektivitas strategi mitigasi karena perempuan memiliki pengetahuan lokal yang kuat mengenai kondisi sosial dan lingkungan di komunitas mereka.

Peran perempuan dalam membangun resiliensi juga terlihat dalam upaya pemulihan ekonomi pascabencana. Banyak perempuan yang mengembangkan strategi adaptasi ekonomi untuk membantu keluarga mereka bertahan setelah kehilangan sumber pendapatan akibat

bencana. Strategi tersebut dapat berupa usaha kecil berbasis rumah tangga, kerja kolektif dalam kelompok perempuan, maupun pengembangan jaringan ekonomi lokal. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai korban bencana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam proses pemulihan komunitas.

Namun demikian, kontribusi perempuan dalam proses penanggulangan bencana sering kali belum sepenuhnya diakui dalam kebijakan formal. Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebencanaan masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kebencanaan masih belum sepenuhnya memberikan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan dalam proses perumusan kebijakan.

Dalam perspektif *Feminist Institutionalism*, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya membutuhkan peningkatan jumlah perempuan dalam institusi formal, tetapi juga transformasi norma dan praktik institusional yang selama ini membatasi partisipasi perempuan. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan kebencanaan, strategi penanggulangan bencana dapat menjadi lebih inklusif, responsif gender, dan efektif dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.

Tantangan Integrasi Perspektif Gender dalam Kebijakan Kebencanaan

Meskipun berbagai kebijakan nasional telah mengakui pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, implementasi perspektif gender dalam kebijakan kebencanaan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman para pembuat kebijakan mengenai pentingnya analisis gender dalam proses perencanaan penanggulangan bencana. Kebijakan kebencanaan sering kali disusun dengan pendekatan teknokratis yang berfokus pada aspek fisik seperti pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, sementara dimensi sosial yang berkaitan dengan pengalaman perempuan kurang mendapat perhatian yang memadai.

Selain itu, keterbatasan data terpilah berdasarkan gender juga menjadi hambatan dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Tanpa data yang memadai mengenai kondisi perempuan dalam situasi bencana, pemerintah akan kesulitan mengidentifikasi bentuk kerentanan yang dihadapi perempuan serta merancang program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi gender dalam kebijakan kebencanaan tidak hanya memerlukan komitmen normatif dalam regulasi, tetapi juga dukungan sistem data dan kapasitas institusional yang memadai.

Tantangan lainnya berkaitan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan kebencanaan. Keterwakilan perempuan yang terbatas

dalam institusi politik maupun lembaga pengelola bencana menyebabkan perspektif perempuan kurang terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan. Padahal, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan kebijakan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami kebutuhan komunitas secara lebih komprehensif.

Dalam perspektif Feminist Institutionalism, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi formal, tetapi juga pada transformasi norma dan praktik institusional yang selama ini membentuk proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat integrasi perspektif gender dalam kebijakan kebencanaan perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas institusi, penguatan sistem data gender, serta perluasan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan banjir di Indonesia secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan perspektif gender secara efektif. Pendekatan kebijakan kebencanaan masih cenderung berfokus pada aspek teknis dan infrastruktur, sementara kebutuhan sosial kelompok rentan, khususnya perempuan, belum menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan mengalami berbagai kerentanan yang lebih kompleks dalam situasi banjir, mulai dari persoalan keamanan di lokasi pengungsian, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, hingga meningkatnya beban domestik dalam keluarga selama masa krisis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan kebencanaan yang belum responsif gender berpotensi memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam kebijakan penanggulangan bencana menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan dapat diakomodasi secara lebih adil. Pemerintah perlu memperkuat implementasi gender mainstreaming dalam setiap tahap kebijakan kebencanaan, termasuk dalam perencanaan mitigasi, pengelolaan pengungsian, serta program pemulihan pascabencana. Dengan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender, upaya penanggulangan bencana diharapkan dapat

meningkatkan perlindungan sosial sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa depan

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S., & Rahimi, F. (2025). Evaluation of gender-based challenges during natural disasters in Parwan Province, Afghanistan. *World Development Perspectives*, 37, 100646. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2024.100646>
- Alam, K., & Rahman, M. H. (2021). Women in natural disasters: A systematic review of gender issues in disaster management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 56, 102106.
- Al-Harthy, A., & Al-Harrasi, S. (2024). Enhancing gender-responsive resilience: The critical role of women in disaster risk reduction in Oman. *Progress in Disaster Science*, 24, 100376. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2024.100376>
- Bradshaw, S., & Fordham, M. (2021). Gender and disasters: From vulnerability to resilience. *Disasters*, 45(1), 1-21.
- Enarson, E., & Chakrabarti, P. (Eds.). (2020). *Women, gender and disaster: Global issues and initiatives*. SAGE Publications.
- Enarson, E., & Pease, B. (2021). The gendered terrain of disaster risk reduction. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(3), 321-334.
- Eriksen, S., Nightingale, A., & Eakin, H. (2021). Reframing adaptation: The political nature of climate vulnerability. *Global Environmental Change*, 69, 102275.
- Fauziyah, I. (2020). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 1-18.
- Fordham, M., & Fothergill, A. (2021). *Gender, climate change and disaster*. Routledge.
- Gaillard, J. C., & Mercer, J. (2021). *Disaster risk reduction: Cases from urban Africa*. Routledge.
- Gaillard, J. C., & Mercer, J. (2021). From knowledge to action: Bridging gaps in disaster risk reduction. *Progress in Human Geography*, 45(3), 655-674.
- Herald, W., Rahmah, M., & Hamdi, M. (2025). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 18(1), 61-78. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v18i1.4543>
- Hidayati, D., & Sari, R. (2023). Gender mainstreaming efforts in disaster management plans: Case study West Nusa Tenggara province, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 87, 103576. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.103576>
- Jayasinghe, S., & Pathirage, C. (2025). A comprehensive framework for empowering women in disaster risk governance in Sri Lanka. *International Journal of Disaster Risk Science*, 16, 768-780. <https://doi.org/10.1007/s13753-025-00676-9>
- Karima, N. (2024). Women in disaster policy: A bibliometric mapping of the research literature 2015-2023. *Policy & Governance Review*, 8(1), 35-57. <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i1.901>

- Khurun'in, I., & Damayanti, R. (2023). *Perempuan & kebijakan publik*. Universitas Brawijaya Press. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232968622>
- Mandasari, N. (2022). Analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 50-59. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.17>
- Muscogiuri, G., Verde, L., Vetrani, C., Barrea, L., Savastano, S., & Colao, A. (2024). Obesity: A gender perspective. *Journal of Endocrinological Investigation*, 47(2), 299-306. <https://doi.org/10.1007/s40618-023-02196-z>
- Nartey, P., Bahar, O. S., & Nabunya, P. (2023). A review of cultural gender norms contributing to gender inequality in Ghana: An ecological systems perspective. *Journal of International Women's Studies*, 25(7), 14.
- Nasir, N., & Rahman, A. (2021). Gender mainstreaming in a disaster-resilient village programme in Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 52, 101974. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101974>
- Nawar, A., & Setyoko, J. (2019). Model pendampingan dinas sosial dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 1(2), 61-73. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i2.6>
- Rahman, M., Islam, M., & Hasan, M. (2023). The importance of women's roles in adaptive capacity and resilience to flooding in rural Bangladesh. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 90, 103660. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.103660>
- Ridhwani, I., & Lestari, Y. (2023). Rekonstruksi kebijakan publik dan hukum Islam terkait gender dalam mencapai SDGs. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1), 37-52. <https://doi.org/10.55380/projus.v3i1.496>
- Rietveld, C. A., & Patel, P. C. (2022). Gender inequality and the gender gap in entrepreneurship: Evidence from 97 countries (2006-2017). *Journal of Evolutionary Economics*, 32(4), 1205-1229. <https://doi.org/10.1007/s00191-022-00780-9>
- Riyaning, R., & Parasasri, A. (2021). Manajemen bencana responsif gender: Kajian inovasi layanan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50891>
- Shang, B. (2022). Addressing gender inequality: Definitions, trends, and policy design. *International Monetary Fund*. <https://doi.org/10.5089/9798400224843.001>
- Sharan, A., & Gaillard, J. C. (2025). Re-gendering the Sendai framework for disaster risk reduction: Experiences of gender diverse groups from India and the Philippines. *International Journal of Disaster Risk Science*, 16, 92-102. <https://doi.org/10.1007/s13753-024-00612-3>
- Siregar, T. A., & Ginting, S. (2023). Efektivitas kebijakan penanggulangan pra bencana banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 137-146. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.618>
- Sovacool, B. K. (2021). Who are the victims of climate change? Gender and inequality in disasters. *Energy Research & Social Science*, 73, 101888. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916>
- Tierney, K. (2020). *Disasters: A sociological approach*. Polity Press.

Wisner, B., Gaillard, J. C., & Kelman, I. (2021). *The Routledge handbook of hazards and disaster risk reduction*. Routledge.